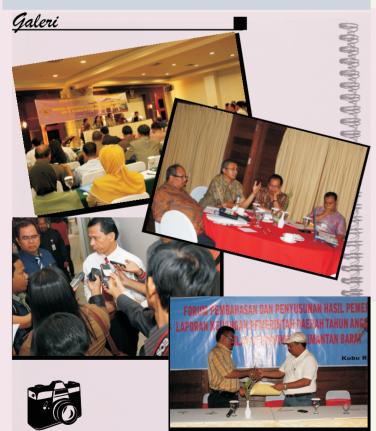


Sosialisasi Panduan Pemeriksaan LKPD



elasa, 26 April 2011 seluruh Ketua Tim serta beberapa anggota tim Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2010 berkumpul di ruang rapat kepala perwakilan untuk mendengarkan paparan mengenai Panduan Pemeriksaan LKPD yang disampaikan oleh Kepala Sub Auditorat Kalbar I Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si. dan Kepala Seksi Kalbar IIB Frider Sinaga, S.E., M.Ak., Ak.

Walaupun masih berupa draft, panduan tersebut sudah digunakan di beberapa perwakilan lain dan dapat membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD. Dan diharapkan Perwakilan Provinsi Kalbar dapat mulai menggunakan panduan tersebut khususnya bagi tim pemeriksa yang belum berangkat.



Kunjungan LSM GN-PK



ibentuk pada akhir Tahun 2010 di tingkat Provinsi Kalbar, LSM GN-PK dalam hal ini Ketua GN-PK Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Rizal, SP, Wakil Ketua Ellysius

Aidy, Ketua GN-PK Kabupaten Sanggau Abang Nurdin, serta beberapa anggota lainnya pada hari Kamis 31 Maret 2011 berkunjung ke kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar. Diterima oleh Plh. Kepala Perwakilan Drs. Nyoman Sujana dan Kasubbag Hukum & Humas Sigit Pratama Yudha, S.H., kunjungan tersebut berlangsung di ruang tamu kepala perwakilan.

Selain bertujuan untuk memperkenalkan cara kerja dan struktur organisasinya yang berpusat di Jakarta Pusat, GN-PK juga ingin bekerjasama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar dalam hal memberantas korupsi khususnya di Kalbar. BPK menyambut baik maksud GN-PK tersebut dan sebelum berakhir, Drs. Nyoman Sujana tidak lupa menyampaikan prosedur yang berlaku di BPK RI dalam memberikan informasi kepada publik.





Redaksi menerima tulisan dan foto dari pembaca. Kirim karya anda ke Redaksi Kabar Kalbar melalui email: hukumhumas.bpkkalbar@gmail.com



Redaksi...

Pengarah: Adi Sudibyo, Penanggung Jawab: Nyoman Sujana, Pemimpin Redaksi: Sigit Pratama Yudha, Anggota: Loehgian Priambadha, Johan Kusuma, Ruth Indirayani Manurung, Roni Altur, Kusbianto, Falentina Damayanti, Dimas Wicaksono.

Alamat Redaksi: Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat 78124, Telepon: 0561 585349, Fax: 0561 713598, Website: http://pontianak.bpk.go.id

ABAR ALBAR MEDIA INFORMASI DAN

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Edisi W April 2011



Dari Redaksi



da yang datang dan ada yang pergi. Benarbe na r menggambarkan kesibukan luar biasa yang sedang

berlangsung di Perwakilan Kalbar. Setelah tiga tim menyelesaikan pemeriksaan dan melakukan proses penyusunan Hasil Pemeriksaan LKPD TA. 2010 pada Kabupaten Melawi, Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas, mulai pertengahan April ini secara bertahap telah berangkat tujuh tim untuk melakukan pemeriksaan LKPD pada tujuh pemda lainnya di wilayah Provinsi Kalbar.

Diantara kesibukan pemeriksaan tersebut bukan berarti kegiatan pendukung di luar pemeriksaaan menjadi terabaikan. Redaksi mencatat pada bulan April ini telah terselenggara kegiatan sosialisasi penyelesaian kerugian negara serta pembahasan konsep Naskah Kesepahaman BPK RI dengan pemda terkait rencana implementasi eaudit sebagai bagian dari program BPK sinergi yang telah dicanangkan oleh Ketua BPK RI.

Salut kepada seluruh pegawai yang telah dan sedang bekerja keras melaksanakan kewajiban. Tak lupa kami iringkan doa agar selalu diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan lancar dan selalu mengedepankan nilainilai dasar BPK RI.

Salam Redaksi

Daftar Isi ...

Halaman 1 Dari Redaksi Penyerahan Laporan Keuangan Pemkab Sintang

Halaman 2 Sosialisasi Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Tidak Tetap Pembahasan dan Penyusunan Hasil Pemeriksaan LKPD TA. 2010 Profil

Halaman 3 Sosialisasi Penyelesaian Kerugian Negara dan Implementasi e-Audit Penyerahan Laporan Keuangan TA. 2010 oleh Pemda di Kalbar

Halaman 4 Sosialisasi Panduan Pemeriksaan LKPD Kunjungan LSM GN-PK Galeri Berita Utama

Penyerahan Laporan Keuangan Pemkab Sintang Disaksikan oleh Angbintama VI



enyerahan Laporan Keuangan Kabupaten Sintang TA. 2010 pada tanggal 07 April 2011 yang mengambil di aula gedung perwakilan terasa berbeda, karena penyerahan laporan kali ini dihadiri oleh Angbintama VI Dr. H. Rizal Djalil. Penyerahan ini dilakukan bersamaan dengan acara tatap muka dan dialog Angbintama VI dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sintang.

Selain Bupati, Ketua DPRD, Inspektur serta para pejabat di lingkungan Kabupaten Sintang, dan para pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, hadir dalam acara ini Gubernur Provinsi Kalbar Drs. Cornelis, M.H.

Selama tiga tahun, Kabupaten Sintang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangannya, dimana terdapat empat permasalahan yang secara kontiniu dan berulang terjadi pada kurun waktu Tahun 2007-2009. Melihat kondisi ini, Angbintama VI menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang belum berupaya secara keras dalam menangani temuan yang ada. Untuk itu beliau berharap dengan adanya dialog kali ini, pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Sintang dapat lebih baik lagi.

G u b e r n u r Kalimantan Barat dalam sambutannya berharap melalui forum ini dapat m e m u n c u l k a n pemikiran strategik dan signifikan dalam upaya mencari solusi t e r b a i k d a l a m m e n y i k a p i tunggakan temuan



yang belum tuntas terselesaikan serta dapat memberikan kontribusi yang besar guna mendorong peningkatan upaya penyelesaian TLHP BPK RI.









Sosialisasi Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Tidak Tetap



erhitung mulai bulan Juli 2011, s e l u r u h pegawai tidak tetap (baik keamanan maupun administrasi) di seluruh perwakilan a kan dijamin kesehatannya oleh BPK RI. Hal ini

disampaikan oleh Dra. Nina Roslina, S.E., M.M. Kasubbag Kesehatan Biro SDM bersama dengan Venny, S. Sos dan Anisa Letisia P. S. pada kunjungannya ke Perwakilan Provinsi Kalbar pada hari Rabu, 27 April 2011. Kedatangan ini bertujuan untuk memaparkan sekaligus mengumpulkan data pegawai tidak tetap untuk diikutsertakan dalam Asuransi Kesehatan *In Health*. Dengan diikutsertakan dalam askes, diharapkan dapat mendorong kinerja para pegawai tidak tetap.

Bersamaan dengan itu, diadakan pula assesment terhadap empat pegawai tidak tetap administrasi. Assesment dilakukan untuk mengukur kinerja pegawai tidak tetap administrasi, sehubungan dengan perpanjangan kontrak yang akan dilakukan pada bulan Juli mendatang. Tes yang dilalui terdiri dari Tes Potensi Akademik dan wawancara dengan Dra. Nina Roslina, S.E., M.M. dan Fika Ariani, S.Psi. dari Biro SDM Jakarta.

Pembahasan dan Penyusunan Hasil Pemeriksaan LKPD TA. 2010



e n g a n selesainya pemeriksaan LKPD terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas, dan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010,

seluruh tim pemeriksa ketiga kabupaten/kota tersebut bersama para Kepala Seksi, Kepala Sub Auditorat, Kepala Subbag Setkalan, Kasetlan dan Kepala Perwakilan berkumpul di Villa Gardenia, Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 April s.d. 01 Mei 2011. Forum ini diselenggarakan untuk membahas hasil pemeriksaan LKPD yang telah dilaksanakan, untuk selanjutnya disusun menjadi laporan final atasl Pemeriksaan LKPD.

Kepala Perwakilan Ir. Adi Sudibyo, M.M. mengharapkan kegiatan ini dapat mempercepat serta

mendorong tim d a l a m menyelesaikan dan menyerahkan LHP sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.



Profil



ahir di Malang, 13 Oktober 1975, N. Diva Mahaendra, S.E., M.M., Ak. menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Brawijaya pada Tahun 2000 dilanjutkan dengan pendidikan pasca sarjana di Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2004.

Terkait dengan terbitnya kebijakan JFK yang akan menghapuskan jabatan kepala seksi teknis, sebagai Kepala Seksi Kalbar IA beliau meyampaikan kebijakan ini di satu sisi menimbulkan harapan akan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pelaksanaan fungsi tugas pemeriksaan. Tetapi di sisi lain dapat mempengaruhi secara psikologis bagi para kepala seksi, baik persiapan dihapuskannya jabatan kepala seksi dan kondisi psikologis terhadap kinerjanya dalam melaksanakan tugas. Namun apapun

kebijakan yang ditetapkan, beliau mengharapkan badan tetap memperhatikan kondisi pelaksana tugas BPK baik dari sisi psikologis maupun kesejahteraannya.

Bergabung dengan Perwakilan Provinsi Kalbar sejak tanggal 17 Maret 2010, ayah satu orang putri dan satu orang putra ini telah mengikuti Diklat Ketua Tim Yunior, Diklat Ketua Tim Senior dan Diklat Pemeriksaan Kinerja.

Sosialisasi Penyelesaian Kerugian Negara dan Implementasi e-Audit



abu 20 April 2011 Kepala Sub Direktorat Kepaniteraan Kerugian Negara dan Daerah BPK RI Eko Setyo Nugroho, S. H. bersama dengan Kepala Seksi Analisis Hukum Keuangan Daerah Sarmauli Mutiara Marpaung, S.H. dan staf Subbag Pemrograman Aplikasi Komputer Arie Purwanto,S.T.,M.Si.,MCSD hadir di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Kedatangan ini untuk memenuhi undangan sebagai pembicara pada kegiatan Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, serta rencana implementasi e-audit pada kegiatan pemeriksaan BPK.

Berlangsung di Hotel Aston Pontianak, acara dihadiri oleh para sekda, sekwan, inspektur, kabag hukum dan kabag keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar serta perwakilan dari Kepolisian Daerah Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar dan Kejaksaan Negeri Pontianak.

Acara diawali dengan penjelasan mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah baik yang disebabkan oleh bendahara, PNS bukan bendahara maupun pihak ketiga oleh Eko Setyo Nugroho, dan dilanjutkan dengan pemaparan rencana e-audit, alur transaksi dalam e-audit serta keunggulan pemeriksaan e-audit oleh Arie Purwanto. Pemaparan diakhiri oleh Sarmauli Mutiara Marpaung dengan penjelasan sisi yuridis konsep nota kesepahaman yang akan menjadi langkah awal kerjasama BPK RI dengan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan acara yang dimoderatori oleh Fatkhur Rokhman, S. E., M. M., Ak., Kepala Subbag Setkalan Perwakilan Provinsi Kalbar.berlangsung dengan lancar. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

Penyerahan Laporan Keuangan TA. 2010 oleh Pemerintah Daerah di Kalbar

enyusul lima kabupaten yang telah menyerahkan laporan keuangan Tahun Anggaran 2010 pada bulan Maret, bulan ini Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalbar, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Bengkayang berturut-turut menyerahkan laporan keuangannya pada tanggal 4, 7, 8, 11, 21 dan 29 April untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan LKPD oleh tim pemeriksa BPK.

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi yang tinggi atas niat baik dan kerja keras pemerintah daerah yang telah menyelesaikan laporan keuangan di tiap-tiap pemerintah daerah dimana sampai dengan akhir April ini, dari 15 (lima belas) pemda di Provinsi Kalbar tercatat 12 (dua belas) pemda telah menyerahkan laporan keuangannya.









